

## **ABSTRAK**

### **PROSES REKRUITMEN DAN SELEKSI SUMBER DAYA APARATUR DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:  
Barita Paskah Maria Siahaan**

Beberapa permasalahan dari aspek sumber daya aparatur di era otonomi daerah, diantaranya: rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban politiknya; kualitas mental sebagian aparat pemerintah yang buruk; pergeseran mental aparat yang bersifat penguasa menjadi pelayan masyarakat yang masih perlu terus dikembangkan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung dengan peran aktif aparatur yang profesional dan berkualitas mental baik. Sumber daya aparatur yang diharapkan ini dapat tercipta apabila menerapkan fungsi pengadaan pegawai dalam manajemen sumber daya aparatur dengan proses rekrutmen dan seleksi di dalamnya.

Penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses rekrutmen dan seleksi sumber daya aparatur serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga hal: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara teori dan fakta, yakni: pola *Integrated System* yang cenderung menjadikan daerah hanya sebagai tim teknis serta membutuhkan waktu cukup lama dalam proses seleksi; pengangkatan PNS tidak mengarah pada *Merit System*; pergeseran makna *Name Requests System*; sumber calon pelamar yang tidak hanya berasal dari dalam dan luar saja. Oleh sebab itu Kabupaten Lampung Tengah tengah berupaya dalam memperbaiki proses rekrutmen dan seleksi dengan mengeluarkan buku Panduan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008; menciptakan susunan kepanitiaan dalam pengadaan pegawai. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya: sistem kepanitiaan yang kurang profesional; sarana dan prasarana kurang mendukung; ketersediaan waktu sempit; kurangnya informasi dalam proses daftar ulang; kurangnya pengawasan masyarakat dan media massa; sistem informasi kepegawaian yang belum secara *online*.

Kata kunci: Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Aparatur, Otonomi Daerah.